

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggriaini, J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. In *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD)*. Harahap, S. S. (2004). *sistem pengawasan manajemen*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Kadarman, A. ., & Udayana, J. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT.Prenhallindo.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : CV Cendekia Press.

Jurnal/Skripsi

- Afni, N. (2020). *Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Di Gampong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur*.
- Danial, F. W. (2018). *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba*. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). *Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo*. 1(01), 1–21.
- Firdausiah, N. (2022). Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat Pendahuluan Hukum pertambangan tidak pernah lepas Dari bagian lingkungan. *Constitution Journal*,1. <https://doi.org/10.35719/constitution.vli2.18>
- Nuralam, N., Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2018). Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 326. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1055>
- Prawiratama, R. (2021). *Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari*.

Racmawati, A., & Maruta, N. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda.

Repository.Untag-Sby.Ac.Id,4.<http://repository.untag-sby.ac.id/20386/11/JURNAL.pdf>
Peraturan.bpk.go.id. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023> Peraturan.bpk.go.id.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.